Lingkar Ekonomika, Vol. 3, No. 1, April, pp. 46 – 58

LINGKAR EKONOMIKA

Available at: http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jle/index

e-ISSN 3032-0747

Efektivitas Alokasi Penggunaan Dana pada Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

Melati Putri Nagari[1] dan Agus Arifin*[1]

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*Corresponding Author: agus.arifin@unsoed.ac.id

Article Information

Received: 7 April 2024
Accepted: 24 April 2024
Published: 26 April 2024

Keywords:
Program effectiveness, Family Hope Program (PKH), allocation of assistance funds.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan, PKH) and the effectiveness of fund utilization in Jembangan Village, which has the largest number of PKH beneficiary households in Banjarnegara Regency. The study employed qualitative data quantified for analysis, collected through questionnaires administered to 102 respondents, comprising 51 PKH beneficiary households and 51 village officials and community leaders. The research instrument was assessed using validity and reliability tests, while the data were analyzed using a Rating Scale and a difference test preceded by a normality test. The findings indicate that PKH implementation was effective, fund utilization was fairly effective, and a difference existed between the effectiveness of program implementation and that of fund allocation. Therefore, program continuity and strengthened monitoring are necessary to improve its effectiveness. This study was subject to limitations because the COVID-19 pandemic hindered the research process and prevented its full implementation.

Informasi Artikel

Diterima: 7 April 2024
Disetujui: 24 April 2024
Dipublikasikan: 26 April 2024

Kata Kunci:
Efektivitas program, Program Keluarga Harapan (PKH), alokasi penggunaan dana bantuan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan efektivitas penggunaan dananya di Desa Jembangan, desa dengan jumlah penerima manfaat PKH terbanyak di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian menggunakan data kualitatif yang dikuantitatifkan, dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 102 responden, terdiri atas 51 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 51 perangkat desa serta tokoh masyarakat. Instrumen diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan analisis data menggunakan Rating Scale dan uji beda yang didahului uji normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH telah efektif, penggunaan dananya cukup efektif, serta terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara pelaksanaan program dan alokasi penggunaan dana. Oleh karena itu, keberlanjutan program dan penguatan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan akibat kondisi pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan penelitian secara optimal.

© 2024 Universitas Jenderal Soedirman

PENDAHULUAN

Angka penduduk di Negara Indonesia tergolong tinggi. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (2020), angka penduduk miskin pada bulan September 2019 mencapai 9,22 persen dengan jumlah penduduk 24,79 juta jiwa. Dengan data yang ada, Indonesia memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Tingkat kemiskinan ini merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia setiap tahun dan masalah serius yang masih sulit diselesaikan. Perubahan sosial, ekonomi dan politik juga merupakan faktor utama yang menyebabkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang mendesak (Suharno, & Setiasih, 2006).

Sudarwati mengemukakan dalam Kartasasmita (2006) bahwa kemiskinan adalah masalah ekonomi yang bercirikan pembangunan dan ketertinggalan sehingga memperburuk perekonomian negara. Masyarakat berpendapatan rendah biasanya tidak mempunyai keahlian bisnis sehingga memiliki kesempatan kecil untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tersisa dari komunitas lain dengan potensi lebih besar. Melalui perspektif yang lebih luas. Kelemahan ini ditandai dengan kemampuan berpendapatan rendah dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok. Masyarakat dengan pendapatan rendah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan khusus dari pemerintah. Meskipun bantuan eksternal terkadang digunakan, tidak ada jaminan bahwa komunitas akan bergantung pada dukungan eksternal. Metode ini kurang efektif apabila tidak ada komunitas yang bisa bertahan dan berkembang jika diisolasi dari kelompok masyarakat lain. Keterpencilan ini menimbulkan sikap negatif, meski situasinya semakin parah.

Kemiskinan dapat berdampak buruk bagi penduduk Indonesia. Dampak kemiskinan bisa menyebar pada tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, Terutama layanan kesehatan dan pendidikan. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah akan mempengaruhi produktivitas sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini dapat menyebabkan beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk dikatakan miskin apabila pendapatan yang mereka peroleh rendah. Kemiskinan cenderung lebih besar berada pada daerah pedesaan (Saifuloh, Suharno, & Ahmad, 2019).

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Persen)

Wilayah	2015 Semester 1 (Maret)	2016 Semester 1 (Maret)	2017 Semester 1 (Maret)	2018 Semester 1 (Maret)
Kota	8.29	7.79	7.72	7.02
Desa	14.21	14.11	13.93	13.20

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2015 – 2018

Berdasarkan Tabel 1, mengenai proporsi penduduk yang berpendapatan rendah berdasarkan tempat tinggal paling banyak berada pada daerah pedesaan. Titik tertinggi presentase kemiskinan di daerah pedesaan berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 14,21 persen, dan pada tahun 2018 bulan Maret mencapai 13,20 persen. Selanjutya pada Tabel 2 akan disajikan data mengenai peresentase angka kemiskinan di Jawa Tengah. Pada Tabel 2, presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah wilayah Barlingmascakeb mencakup antara lain Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabuaten Kebumen mengalami fluktuasi. Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan angka presentase kemiskinan dari tahun 2014 menuju 2015 yang awalnya 17,77 persen berubah menjadi 18,37 persen kemudian mengalami

penurunan lagi pada tahun 2016 hingga 2019 menjadi 14,76 persen. Yang berarti Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan presentase penduduk miskin pada tahun 2015. Sedangkan untuk wilayah Barlingmascakeb lainnya juga mengalami peningkatan presentase peduduk miskin pada tahun 2015, namun hanya satu kabupaten yang tidak mengalami peningkatan pada tahun 2015, yaitu Kabupaten Kebumen. Kabupaeten Kebumen mengalami penurunan presentase penduduk miskin setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 2. Presentase Angka Kemiskinan di Jawa Tengah (Persen)

Wilayah Jawa Tengah	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Cilacap	14,21	14,39	14,12	13,94	11,25	10,73
Kabupaten Banyumas	17,45	17,52	17,23	17,05	13,50	12,53
Kabupaten Purbalingga	19,75	19,70	18,98	18,80	15,62	15,03
Kabupaten Banjarnegara	17,77	18,37	17,46	17,21	15,46	14,76
Kabupaten Kebumen	20,50	20,44	19,86	19,60	17,47	16,82
Kabupaten Purworejo	14,41	14,27	13,91	13,81	11,67	11,45
Kabupaten Wonosobo	21,42	21,45	20,53	20,32	17,58	16,63
Kabupaten Magelang	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23	10,67
Kabupaten Boyolali	12,36	12,45	12,09	11,96	10,04	9,53
Kabupaten Klaten	14,56	14,89	14,46	14,15	12,96	12,28
Kabupaten Sukoharjo	9,18	9,26	9,07	8,75	7,41	7,14
Kabupaten Wonogiri	13,09	12,98	13,12	12,90	10,75	10,25
Kabupaten Karanganyar	12,62	12,46	12,49	12,28	10,01	9,55
Kabupaten Sragen	14,87	14,86	14,38	14,02	13,12	12,79
Kabupaten Grobogan	13,86	13,68	13,57	13,27	12,31	11,77
Kabupaten Blora	13,66	13,52	13,33	13,04	11,90	11,32
Kabupaten Rembang	19,50	19,28	18,54	18,35	15,41	14,95
Kabupaten Pati	12,06	11,95	11,65	11,38	9,90	9,46
Kabupaten Kudus	7,99	7,73	7,65	7,59	6,98	6,68
Kabupaten Jepara	8,55	8,50	8,35	8,12	7,00	6,66
Kabupaten Demak	14,60	14,44	14,10	13,41	12,54	11,86
Kabupaten Semarang	8,05	8,15	7,99	7,78	7,29	7,04
Kabupaten Temanggung	11,55	11,76	11,60	11,46	9,87	9,42
Kabupaten Kendal	11,80	11,62	11,37	11,10	9,84	9,41
Kabupaten Batang	11,13	11,27	11,04	10,80	8,69	8,35
Kabupaten Pekalongan	12,57	12,84	12,90	12,61	10,06	9,71
Kabupaten Pemalang	18,44	18,30	17,58	17,37	16,04	15,41
Kabupaten Tegal	9,87	10,09	10,10	9,90	7,94	7,64
Kabupaten Brebes	20,00	19,79	19,47	19,14	17,17	16,22
Kota Magelang	9,14	9,05	8,79	8,75	7,87	7,46
Kota Surakarta	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70
Kota Salatiga	5,93	5,80	5,24	5,07	4,84	4,76
Kota Semarang	5,04	4,97	4,85	4,62	4,14	3,98
Kota Pekalongan	8,02	8,09	7,92	7,47	6,75	6,60
Kota Tegal	8,54	8,26	8,20	8,11	7,81	7,47

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, 2014 – 2019

Berdasarkan data pada Tabel 2, angka presentase penduduk miskin berbeda dengan angka pada Tabel 3, karena sumber yang diambil berbeda, yaitu bersumber dari Badan Pusat Satistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2014 sampai 2019, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara tahun 2012 sampai 2017, namun demikian untuk selisih hanya berbeda sedikit. Selanjutnya, akan lebih diperkecil lagi untuk wilayah Barlingmascakeb, yaitu Kabupaten Banjarnegara, yang akan lebih dijelaskan Kabupaten Banjarnegara karena penelitian ini akan meneliti salah satu desa yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Untuk Tabel 3 akan menampilkan angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2014 sampai 2017.

Tabel 3. Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara, 2012 – 2017

Kemiskinan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	205.369	221.056	229.718	229.718	236.399	252.328
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	164	168,8	165,4	165,4	158,2	156,8
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	18,87	-	18,34	18,34	17,43	17,18

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, 2012 – 2017

Kemiskinan merupakan salah satu keadaan dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar atau atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan (Saifuloh, Ahmad, & Suharno, 2019). Data yang diambil pada Tabel 3 bersumber dari Badan Pusat Statisik Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 sampai 2017. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Pangan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Pangan (GKNM). Orang yang rata-rata pengeluaran bulanan per kapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara paling tinggi berada pada tahun 2013 sebesar 168,80 ribu jiwa, dan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan tertinggi mencapai 18,87 persen tahun 2012.

Berdasarkan program – program penanggulangan kemiskinan yang ada, penelitian ini akan membahas mengenai salah satu program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut "Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan" 2019, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan secara bersyarat kepada masyarakat berpendapatan rendah. Rencana tersebut untuk meminimalisir beban keluarga miskin, serta diharapkan dapat mengangkat generasi penerus keluar dari kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Untuk negara lain dikenal dengan nama *Conditional Cash Transfers* (CCT). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian lain yang diterbitkan oleh SA Purwanto dan S Sumartono tahun 2013 bertajuk "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rantai Penanggulangan Kemiskinan", menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah menghasilkan perubahan positif dalam kebutuhan keluarga. Misi penting Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan semakin menonjol (Badan Pusat Statistik (BPS), 2016).

Untuk mengurangi angka kemiskinan pemerintah telah menetapkan sasaran hingga 7 sampai 8 persen pada 2019. PKH diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) secara signifikan sekaligus mengurangi penduduk miskin dan mempersempit kesenjangan (koefisien Gini). Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan pada 34 provinsi yang meliputi 512 kabupaten / kota dan 7.214 kabupaten. Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 4. Perkembangan Jumlah KPM PKH

Tahun	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	KPM PKH
2007	7	48	337	387.947
2008	13	70	637	620.848
2009	13	70	781	726.376
2010	20	88	946	774.293
2011	25	119	1.387	152.201
2012	33	169	2.001	1.454.655
2013	33	336	3.417	2.362.533
2014	34	418	4.870	2.871.827
2015	34	472	6.080	3.511.088
2016	34	504	6.402	5.981.528
2017	34	409	6.730	6.228.810
2018	34	512	7.214	10.000.000

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), 2019

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun ke tahun terus meningkat. Meskipun dari tahun 2014–2018 provinsi yang memperoleh manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah sama yaitu 34 provinsi tetapi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tetap meningkat. Kajian di bawah akan membahas suatu daerah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dengan angka kemiskinan 14,76 persen. Seperti pada tabel sebelumnya. Wilayah Banjarnegara memiliki jumlah keluarga penerima yang cukup besar yaitu sebanyak 48.609 keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut akan diuraikan pada Tabel 5 yang akan membahas jumlah rumah tangga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banjarnegara Tahap empat Tahun 2019.

Berdasarkan data pada Tabel 5 di bawah ini, Kecamatan terbesar memperoleh manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kecamatan Punggelan sebesar 5.448 jiwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, riset ini akan meneliti Kecamatan Punggelan yang memiliki angka terbesar di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian akan dilanjutkan pada Tabel 6 mengenai jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Punggelan.

Selanjutnya, berdasarkan data pada Tabel 6 di bawah ini. Kecamatan Punggelan menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak terdapat di Desa Jembangan sebesar 582 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut investigasi lapangan yang telah dilaksanakan, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jembangan ini sudah diterapkan mulai tahun 2014. Sejak tahun 2014 desa ini memang sudah termasuk desa yang paling banyak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga tahun 2020. Penerima bantuan

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jembangan didampingi oleh 2 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 5. Agregat KPM PKH Tahap 4 Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara

No.	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Banjarmangu	2.293
2.	**Banjarnegara**	**1.515**
3.	Batur	1.952
4.	Bawang	1.945
5.	Kalibening	2.738
6.	Karangkobar	2.009
7.	Madukara	1.671
8.	Mandiraja	2.768
9.	Pagedongan	2.009
10.	Pagentan	1.792
11.	Pandanarum	1.240
12.	Pejawaran	3.204
13.	Punggelan	5.448
14.	Purwanegara	3.565
15.	Purwareja Klampok	1.542
16.	Rakit	2.341
17.	Sigaluh	980
18.	Susukan	3.523
19.	Wanadadi	1.604
20.	Wanayasa	4.604
Total		**48.609**

Sumber : Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), 2020

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jembangan terlihat seperti telah berjalan sesuai apa yang diinginkan, tetapi ternyata masih banyak mengalami kendala tanpa disadari. Kendala tersebut adalah masih banyaknya penduduk yang belum merasakan program tersebut, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut, serta masih kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai pola pikir atau perilaku dalam mengalokasikan dana bantuan yang diberikan hingga sejauh mana tercapainya sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan berhasil secara maksimal.

.

Tabel 6. Agregat KPM PKH Tahap 4 Tahun 2019
Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah KPM
1	Punggelan	Badakarya	342
2	Punggelan	Bondolharjo	339
3	Punggelan	Danakerta	403
4	**Punggelan**	**Jembangan**	**582**
5	Punggelan	Karangsari	339
6	Punggelan	Kecepit	157
7	Punggelan	Klapa	350
8	Punggelan	Mlaya	244
9	Punggelan	Petuguran	432
10	Punggelan	Punggelan	279
11	Punggelan	Purwasaba	195
12	Punggelan	Sambong	267
13	Punggelan	Sawangan	167
14	Punggelan	Sidarata	305
15	Punggelan	Tanjungtirta	488
16	Punggelan	Tlaga	414
17	Punggelan	Tribuana	145
Total			**5.448**

Sumber : Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), 2020

Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Seperti masih banyak masyarakat yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan lainnya contohnya untuk memenuhi kebutuhan lain seperti berbelanja, membeli barang-barang yang diminta anak di luar kebutuhan pendidikan, dan kesehatan, membayar hutang, membeli minuman beralkohol, bahkan berjudi, dan lain sebagainya yang dianggap menyeleweng dari yang diharapkan pemerintah. Pola perilaku yang seperti itu yang nantinya akan menjatuhkan masyarakat tersebut. Sehingga, harus dilaksanakan riset penelitian yang tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Penanggulangan Kemiskinan khususnya di Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Dari program tersebut akan diketahui bagaimana pengelolaan dana bantuan yang diberikan pada masyarakat yang mendapat manfaat tersebut, apakah pengelolaan dana oleh masyarakat sudah diterapkan sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi dasarnya. Hal-hal tersebut diperlukan agar pemerintah dapat lebih fokus pada optimalisasi upaya pengentasan kemiskinan yang berdampak pada Banjarnegara (khususnya desa Jembangan).

Berdasarkan riset-riset terdahulu, kebanyakan riset hanya membahas mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) saja, namun pada riset ini tidak hanya sekedar menjelaskan mengenai efektivitas program atau dari sisi programnya saja, Namun studi ini juga akan menjelaskan dana bantuan pemerintah kepada keluarga penerima, atau dengan kata lain studi ini lebih menitikberatkan pada dua aspek yaitu perencanaan dan penerima manfaat. Penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas beserta pengertian–pengertian yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Efektivitas Program Menurut Sutrisno (2007:125-126) diukur melalui : (1) Pemahaman Program (2) Ketepatan Sasaran (3) Ketepatan Waktu (4) Tercapainya Tujuan (5)

Dampak Sosial Ekonomi, untuk mengukur analisis efektivitas penggunaan dana pada penerima manfaat diambil dari variabel dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Ketepatan Dana, Kecukupan Dana, Sasaran Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di Kabupaten Jember yang ditulis oleh Risca, Andiana, dan Taufik tahun 2015 yaitu (1) Ketepatan Dana (2) Kecukupan Dana (3) Sasaran Penggunaan Dana (4) Dampak Sosial Ekonomi.ktu (4) Tercapainya Tujuan (5) Dampak Sosial Ekonomi, Untuk mengetahui tingkat efektivitas program, dan penggunaan dana bantuan digunakan teknik analisis model rating scale, serta teknik analisis uji beda untuk mengetahui kemanfaatan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

METODE ANALISIS

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekuder diperoleh dari koordinator PKH Kabupaten Banjarnegara, dan data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah variabel X dan Y di mana Variabel X merupakan efektivitas PKH dan variabel Y adalah efektivitas penggunaan dana PKH. Untuk menguji keabsahan data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rating scale untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2 yaitu tingkat efektivitas masing-masing variabel, kemudian dilanjutkan menggunakan uji beda yang terdiri dari uji normalitas dan independent *t test* untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat efektivitas PKH dengan tingkat efektivitas penggunaan dana PKH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dan diskusi mengenai tingkat efektivitas PKH dengan tingkat efektivitas penggunaan dana PKH. Serta mengenai perbedaan tingkat efektivitas kedua variabel tersebut, manakah yang lebih tinggi tingkat keefektivitasannya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 8 . Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tujuan 1

No.	Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
1	**Efektivitas Keluarga (PKH) Program Harapan**			
	- Item 1	0,560	0,281	Valid
	- Item 2	0,452	0,281	Valid
	- Item 3	0,415	0,281	Valid
	- Item 4	0,367	0,281	Valid
	- Item 5	0,807	0,281	Valid
	- Item 6	0,547	0,281	Valid
	- Item 7	0,653	0,281	Valid
	- Item 8	0,419	0,281	Valid
	- Item 9	0,654	0,281	Valid
	- Item 10	0,348	0,281	Valid
	Cronbanch Alpha Variabel X	0,643	0,281	Reliabel

Sumber: Output SPSS Versi 25

Tabel 9 . Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tujuan 2

No.	Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
2	**Efektivitas Alokasi Penggunaan Dana pada Penerima Manfaat PKH**			
	- Item 1	0,424	0,281	Valid
	- Item 2	0,480	0,281	Valid
	- Item 3	0,483	0,281	Valid
	- Item 4	0,453	0,281	Valid
	- Item 5	0,539	0,281	Valid
	- Item 6	0,426	0,281	Valid
	- Item 7	0,417	0,281	Valid
	- Item 8	0,612	0,281	Valid
	- Item 9	0,682	0,281	Valid
	- Item 10	0,408	0,281	Valid
	Cronbanch Alpha Variabel X	0,696	0,281	0,643

Sumber: Output SPSS Versi 25

Berdasarkan data di atas, maka tiap butir kuesioner pada penelitian ini untuk uji validitas dikatakan valid karena r hitung > dibandingkan r tabel. Demikian juga, untuk uji reliabilitas dikatakan reliabel karena r hitng > r tabel.

Analisis *Rating Scale*

Setelah melakukan uji pada kuesioner, selanjutnya dilakukan analisis *rating scale* untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2.

Tabel 10. Rangkuman Hasil Analisis *Rating Scale* pada Efektivitas PKH

No.	Variabel	Total	Rata – rata	Keterangan
1.	Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)	4.052	79	Cukup Efektif

Sumber : Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Efektivitas Program Keluarga Harapan dikatakan sudah cukup efektif.

Tabel 11. Rangkuman Hasil Analisis *Rating Scale* pada Efektivitas Penggunaan Dana PKH

No.	**Variabel**	**Total**	**Rata - rata**	**Keterangan**
1.	Efektivitas Penggunaan Dana PKH	3.092	61	Cukup Efektif

Sumber : Data Primer diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa secara statistik Efektivitas pada alokasi penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan sudah cukup efektif.

Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis Hasil Uji Normalitas

Tabel 12. Ringkasan Hasil Uji Normalitas – *Shapiro Wilk*

	X (Efektivitas PKH)	**Y** (Efektivitas Penggunaan Dana PKH)
Statistic	967	900
df	51	51
Sig.	0,168	0,061

Sumber : Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Shapiro Wilk* di atas bahwa hasil sebaran skor sebelum diberikan tindakan atau yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya dengan nilai 0,168 dan setelah dilakukan tindakan seperti halnya pernyataan di atas diperoleh 0,000. Dengan demikian, masing–masing variabel diperoleh nilai signifikansi > 0,05 maka sebaran data dikatakan berdistribusi normal.

Independent Test

Uji Independent dilakukan atas dasar perbedaan N dari 2 kuesioner yang berbeda. Dengan kata lain adalah terdapat dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda.

Tabel 12. Ringkasan Hasil Independent Test

	t	*df*	*Sig. (2-tailed)*
XY	13,017	100	0,000
	13,017	98,652	0,000

Sumber : Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan hasil independent samples test di atas nilai yang diperoleh 0,000 atau 0,000 < 0,05 yang berarti t signifikan, sehingga dapat dikatakan "Ada Beda".

Pengujian Hipotesis:

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat kemanfaatan positif dan negatif bagi KPM PKH dan efektivitas alokasi penggunaan dana PKH adalah "tidak dapat ditolak". Dengan kata lain, tingkat efektivitas pada Program Keluarga Harapan (PKH) "lebih tinggi" dibandingkan dengan tingkat efektivitas manfaat yang diterima KPM PKH.

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara langsung dengan narasumber setempat yaitu anggota KPM PKH. Artinya, Program Keluarga Harapan (PKH) ini dalam pelaksanaannya bisa dikatakan cukup berhasil, namun pada kenyataannya yang dirasa oleh KPM PKH masih belum efektif secara maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang ada di lapangan, sebagian besar KPM PKH menyatakan bahwa dana bantuan yang diberikan belum maksimal dalam penggunaannya khususnya dibagian kesehatan dan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif. Begitu pula dengan penggunaan dana bantuan pada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara statistik juga dikatakan sudah cukup efektif. Namun, terdapat perbedaan rata-rata antara efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan efektivitas alokasi penggunaan dana dana pada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang di mana tingkat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) lebih tinggi dibandingkan dengan efektivitas alokasi penggunaan dana bantuan dana pada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), meskipun secara statistik keduanya sama-sama tergolong cukup efektif.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi dari penelitian adalah dengan melihat hasil analisis mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan maka diharapkan adanya keberlanjutan dan pengawasan lebih pada program tersebut agar semakin efektivitas, untuk alokasi penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) harus dilakukan pengawasan dan pemantauan yang lebih lagi sehingga tidak ada yang menggunakan dana tersebut diluar tujuan program. Hal ini bertujuan agar efektivitas Program Keluarga Harapan tetap stabil atau bahkan terus meningkat, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat meningkatkan kualitas kebutuhan hidupnya.

Limitasi

Keterbatasan dalam penelitian ini, untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya adalah obyek penelitian ini difokuskan hanya kepada satu dusun saja dikarenakan kondisi lingkungan yang sedang tidak stabil, penelitian ini kurang menjelaskan secara detail mengenai pengambilan sampel, danpengambilan data menggunakan kuesioner terkadang tidak menunjukkan keadaan atau perasaan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Attanasio, O., Battistin, E., Fitzsimons, E., et al. (2005). *How effective are conditional cash transfers? Evidence from Colombia.*

Azizah, N. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.*

Azwar, S. (2017). *Penyusunan skala psikologi* (Edisi ke-2). Pustaka Pelajar.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2009). *Hubungan Program Keluarga Berencana Nasional dengan kesejahteraan keluarga*. BKKBN.

Badan Pusat Statistik Banjarnegara. (1997). *Statistik kesejahteraan rumah tangga*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Banjarnegara. (2016). *Jakarta dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Banjarnegara. (2019a). *Angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara tahun 1996–2017*. Badan Pusat Statistik Banjarnegara.

Badan Pusat Statistik Banjarnegara. (2019b). *Kemiskinan dan ketimpangan*. Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik Banjarnegara. (2019c). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di*

Provinsi Jawa Tengah, 1996–2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Berndt, A., & Gupta, A. (2009). Moral hazard and adverse selection in the originate-to-distribute model of bank credit. *Journal of Monetary Economics, 56*, 725–743.

Budiani, N. W. (2009). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial, 1*(2).

Dharmawan, et al. (2009). *Agenda riset strategis bidang penanggulangan kemiskinan 2010–2015*. Institut Pertanian Bogor.

Foguel, M. N., & Paes de Barros, R. (2010). The effects of conditional cash transfer programmes on adult labour supply: An empirical analysis using a time-series-cross-section sample of Brazilian municipalities. *Estudos Econômicos (São Paulo), 40*(2), 259–293.

Hasan, N. F. (2017). Efektivitas penggunaan dana bantuan pendidikan. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 4*(1), 1–18.

Hasna, Nurhadji, & Indriyana. (2020). Analisis dampak pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 7*(2), 108–116.

Ibrahim, Taswan, & Ragimun. (2010). *Moral hazard dan pencegahannya pada industri perbankan di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kakwani, N., Veras, F., & Hyun, H. (2005). *Conditional cash transfers in African countries*. International Poverty Centre, United Nations Development Programme.

Kuncoro, M. (2002). *Ekonomika pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. UPP AMP YKPN.

Mirrlees, J. A. (1999). The theory of moral hazard and unobservable behaviour: Part I. *The Review of Economic Studies, 66*, 3–21.

Ozer, E. J., et al. (2009). Effects of a conditional cash transfer program on children's behavior problems. *Pediatrics, 123*(4), e630–e637.

Rachmawati, E. (2013, May 9). *Manajemen penggunaan dana/alokasi dana*. https://nanarara91.blogspot.com/2013/05/manajemen-penggunaan-dana-alokasi-dana.html

Ratmono, D. (2013). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EViews 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Robertson, L., et al. (2013). Effects of unconditional and conditional cash transfers on child health and development in Zimbabwe: A cluster-randomised trial. *The Lancet, 381*(9874), 1283–1292.

Rosalina, I. (2014). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. *Publika, 2*(2).

Saifuloh, N. I., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2019). The effect of employment aspects on poverty in Central Java, Indonesia. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah, 14*(1).

Saifuloh, N. I., Suharno, S., & Ahmad, A. A. (2019). Phenomena of poverty in rural areas and its construction through employment. *ICORE, 5*(1).

Samosir, A. P. (2013). Analisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2011 (The analysis of 2011 Family Hope Program implementation effectiveness). *Jurnal Borneo Administrator, 9*(2).

Solih, I. (1986). *Manajemen rumah tangga*. Angkasa.

Soputan, G., Ferdinand, & Lexie. (2018, October). The effectiveness of Keluarga Harapan Program: Efforts to change the behaviour of the poor. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Atlantis Press.

Sugiono, A., & Kurrohman. (2015). Pengaruh ketepatan dana, kecukupan dana, dan sasaran

penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2*(1), 23–28.

Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.

Suharno, S., & Setiasih, E. (2006). Kajian pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai pada rumah tangga miskin (Studi kasus di wilayah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas). *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah, 1*(2).

Susilowati, T. (2016). *Peramalan PDRB Kabupaten Tulang Bawang dengan metode Fuzzy Mamdani dan regresi linear berganda*.

Sutrisno, E. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.

United Nations Development Programme. (2010). *Human development report 2009*. https://hdr.undp.org/en/statistics/

Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik, 2*(1), 29–34.

Usman, C. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan (Suatu studi di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik, 2*(1).